

ORIENTASI PEDAGOGIK DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP KEMAJUAN ILMU PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI

Rijal Pirdaos

(Dosen PAI FTK IAIN Raden Intan Lampung)

(Email: rijalfirdaos@yahoo.com)

Abstrak

Advances in information technology and communication today has a lot to change the culture and civilization of the Indonesian nation with all its positive and negative impacts. As an entity related to the culture and civilization, education in various parts of the world experienced a fundamental change in the era of globalization. There are many advances in science and technology that could be enjoyed by mankind. But today, there are still some weaknesses of education in Indonesia, of which include; First, lack of access to education, secondly, improving governance. Third, improving the quality of educational institutions and out put. This research aims to determine the orientation of Pedagogic and socio-cultural changes towards the advancement of science and technology education that includes the role of education in the era of globalization, the future school model, the development of gender-based education, sertakesetaraan gender in education.

Keywords: Pedagogy, Socio-Cultural, Educational Science and Technology

A. Pendahuluan

Proses modernisasi yang kita rasakan saat ini, tanpa sadar telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan peradaban dunia. Kedua dampak tersebut masing-masing menjadi preferensi menarik bagi mereka yang memanfaatkannya secara pragmatis. Istilah modern menurut Pius A. Partanto (2001), adalah sebagai cara baru; model baru; bentuk baru; atau mutakhir. Sementara modernitas merupakan bentuk sifat yang berarti keadaan modern.

Hal ihwal modernisasi, sesungguhnya tidak terlepas dari sumbangan ilmu pengetahuan sebagai metode sistematis yang terorganisir. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan telah merangsang timbulnya gejala beragam bagi kemajuan dunia, yang secara baik telah membantu dalam setiap kebutuhan kelayakan hidup manusia. Laju modernisasi yang seimbang dengan kompetensi sumber daya manusianya, mulanya di desain untuk menciptakan keramahan sikap, kebijakan berpikir, keadilan bertindak, serta tindak tanduk positif yang mendukung pada kesejahteraan kepentingan sesama.

Namun sebaliknya, tingkat modernitas yang melaju cepat, seakan tak berdaya menahan laju tingginya kriminalitas. Fenomena maraknya kriminalitas yang ada, secara berurutan, didukung oleh melonjaknya kecanggihan teknologi yang melesat instan. Bergerak begitu bebas, menembus tanpa batas. Globalisasi secara kasat mata tak bisa terbendung dengan berbagai dalih modernisasi. Bahkan, cara baru kejahatan yang secara kasat mata melanggar hukum pun, telah menjadi produk dari modernisasi.

B. Pembahasan

1. Peran Pendidikan Di Era Globalisasi

Sebagai suatu entitas yang terkait dalam budaya dan peradaban manusia, pendidikan di berbagai belahan dunia mengalami perubahan sangat mendasar dalam era globalisasi. Ada banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati umat manusia. Namun sebaliknya, kemajuan tersebut juga beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Pendidikan sudah menjadi komoditas yang makin menarik.

Dalam dinamika globalisasi, anak-anak bangsa tercecer dalam berbagai sekolah yang beragam menurut latar belakang sosioekonomi yang berbeda. Negara belum mampu memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan

yang bermutu. Sampai saat ini, belum tampak adanya pembenahan yang signifikan dan terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Muncul pertanyaan besar: Ke mana arah pendidikan di Indonesia?

Pendidikan dimaksudkan sebagai mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Masa depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa.

Dalam menghadapi era globalisasi, persaingan akan semakin ketat, sehingga sangat dibutuhkan kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas secara langsung yang dapat meningkatkan daya saing UKMT di kemudian hari. Kesulitan dan hambatan pada UKMT di Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya jalur pemasaran, dukungan teknologi dan terbatasnya permodalan. Terlebih lagi, bagi pengusaha pemula, masalah ini akan terlihat lebih besar dan menjadi kendala cukup besar dalam mengembangkan usahanya.

Menatap masa depan berarti mempersiapkan generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap pembelajaran dan merupakan terapi kesehatan jiwa bagi anak bangsa, semoga munculnya generasi technopreneurship dapat memberikan solusi atas permasalahan jumlah pengangguran intelektual yang ada saat ini. Selain itu juga bisa menjadi arena untuk meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan IPTEK, sehingga kita bisa mempersiapkan tenaga handal ditengah kompetisi global. mulailah dari diri sendiri untuk berbuat sesuatu guna menciptakan pendidikan kita bisa lebih baik dan berkualitas, karena ini akan menyangkut masa depan anak-anak kita dan juga Bangsa Indonesia.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dewasa ini telah banyak mengubah budaya dan peradaban bangsa Indonesia dengan segala dampak positif dan negatifnya. Kalo kita perhatikan pada tahun 1991:

- a. Masih banyak gedung bioskop baik di kota maupun dipelosok desa dan banyak peminatnya, serta banyak orang hajatan yang memanfaatkan hiburan baik layar tancap maupun video,

- b. Wartel masih sangat laku dimana-mana sampai banyak sekali orang yang berminat buka wartel dan berebut yang membuat telkom jadi bingung serta membuat suatu peraturan yang dijadikan syarat untuk mendirikan wartel,
- c. Telepon kabel/rumah banyak sekali peminatnya dan telkom kerepotan untuk melayani masyarakat
- d. Di kantor-kantor jarang ada komputer, karena komputer masih menjadi barang yang mahal
- e. Di Perguruan Tinggi dan sekolah, belajar dengan menggunakan OHP sudah dianggap kere

2. Model Sekolah Masa Depan?

Kalau kita perhatikan di era globalisasi yang dibutuhkan adalah bagaimana diri kita dapat diterima keberadaannya di belahan dunia manapun, dengan bekal sertifikat Nasional apakah cukup tentunya untuk menghadapi era globalisasi kita membutuhkan sertifikasi internasional sebagai pengakuan atas eksistensi kita di level internasional, sehingga kita dapat berselancar ke negara manapun dengan sertifikat internasional yang kita miliki. Mungkin ke depan, peserta didik lebih memilih Ujian Internasional yang Ijazahnya dapat dibanggakan dan dapat digunakan untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan mendapat pengakuan secara internasional. Persoalan yang muncul adalah:

- a. Apakah sekolah siap menyelenggarakan pendidikan bertaraf Internasional untuk mendapat Ijazah Internasional
- b. Apakah Guru sudah kompeten dalam menyelenggarakan pendidikan

Bagaimana kalau tidak siap?

Globalisasi seperti gelombang yang akan menerjang, tidak ada kompromi, kalo kita tidak siap maka kita akan diterjang, kalo kita tidak mampu maka kita akan menjadi orang tak berguna dan kita hanya akan jadi penonton saja.

Apa yang akan terjadi?

- a. Desakan dari orang tua yang menuntut sekolah menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional
- b. Desakan dari siswa untuk bisa ikut ujian sertifikasi internasional

Bagaimana jika sekolah tidak mampu memenuhi harapan itu?

sekolah akan ditinggalkan oleh siswa, dan tidak ada lagi yang mau sekolah di sekolah konvensional. Seiring dengan hal itu, maka akan bermunculan:

- a. *Home schooling*, yang melayani siswa memenuhi harapan siswa dan orang tua karena tuntutan global.
- b. *Virtual School* dan *Virtual University*

Bagaimana mempertahankan eksistensi sekolah?

agar sekolah tetap eksis, maka sekolah harus:

- a. Meningkatkan mutu SDM terutama Guru dalam penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya
- b. Peningkatan Mutu Guru dalam penguasaan teknologi Informasi dan Komunikasi
- c. Peningkatan Mutu Manajemen sekolah
- d. Peningkatan Mutu sarana dan Prasarana
- e. Sertifikasi Internasional untuk guru

3. Pengembangan Pendidikan Berbasis Gender

Dalam konstruksi Barat, bahwa ada beberapa masalah yang terkait dengan gender, yaitu gender differentiation, gender equality dan gender oppression. Dalam hitungan orang Barat, bahwa di dunia ini masih ada perbedaan gender, ketidaksamaan gender dan kekerasan gender. Ketiga hal inilah yang harus diperhatikan ke depan terkait dengan pemberdayaan pendidikan, khususnya madrasah.

Dewasa ini, sebagaimana diketahui bahwa masih ada beberapa kelemahan pendidikan di Indonesia, yaitu pertama, rendahnya akses pendidikan. Kedua, adalah peningkatan tata kelola. Jangan sampai ada pernyataan: karena madrasah tidak ada apa-apanya, maka juga dikelola apa adanya. Yang semestinya menjadi penting adalah bagaimana mengelola madrasah yang tidak ada apa-apanya tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan madrasah yang baik tentu akan menjadi bagian dari peningkatan kualitas SDM. Hingga hari ini, masih kuat pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam peningkatan human capital. Banyak orang yang sekarang menduduki jabatan penting di negeri ini, yang sekolahnya dulu di madrasah. Jadi, madrasah telah memberikan sumbangan penting di dalam peningkatan SDM atau menjadi instrumen human capital.

Ketiga, adalah peningkatan kualitas kelembagaan dan output pendidikan. Melalui tata kelola yang baik, maka akan berdampak positif bagi institusi pendidikan tersebut. Misalnya

yang perlu dikedepankan adalah bagaimana agar lembaga pendidikan bisa terakreditasi. Makanya, jika ada lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi, maka menjadi kewajibannya untuk menularkan ilmunya tersebut agar lembaga pendidikan lainnya juga bisa terakreditasi. Islam mengajarkan agar selalu melakukan tolong menolong di dalam kebaikan.

4. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Banyak laki-laki mengatakan, sungguh tidak mudah menjadi laki-laki karena masyarakat memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadapnya. Mereka haruslah sosok kuat, tidak cengeng, dan perkasa. Ketika seorang anak laki-laki diejek, dipukul, dan dilecehkan oleh kawannya yang lebih besar, ia biasanya tidak ingin menunjukkan bahwa ia sebenarnya sedih dan malu. Sebaliknya, ia ingin tampak percaya diri, gagah, dan tidak memperlihatkan kekhawatiran dan ketidak berdayaannya.

Ini menjadi beban yang sangat berat bagi anak laki-laki yang senantiasa bersembunyi di balik topeng maskulinitasnya. Kenyataannya juga menunjukkan, menjadi perempuan pun tidaklah mudah. Stereotip perempuan yang pasif, emosional, dan tidak mandiri telah menjadi citra baku yang sulit diubah. Karenanya, jika seorang perempuan mengekspresikan keinginan atau kebutuhannya maka ia akan dianggap egois, tidak rasional dan agresif. Hal ini menjadi beban tersendiri pula bagi perempuan.

Keadaan di atas menunjukkan adanya ketimpangan atau bias gender yang sesungguhnya merugikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Membicarakan gender tidak berarti membicarakan hal yang menyangkut perempuan saja. Gender dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat.

Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Jika ibu atau pembantu rumah tangga (perempuan) yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan.

Pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti media, metode, serta buku ajar yang menjadi pegangan para siswa sebagaimana ditunjukkan oleh Muthalib dalam *Bias Gender dalam Pendidikan* ternyata sarat dengan bias gender. Dalam buku ajar misalnya, banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan

gender. Sebut saja gambar seorang pilot selalu laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang "hanya" dimiliki oleh laki-laki.

Dalam rumusan kalimat pun demikian. Kalimat seperti "Ini ibu Budi" dan bukan "ini ibu Suci", "Ayah membaca Koran dan ibu memasak di dapur" dan bukan sebaliknya "Ayah memasak di dapur dan ibu membaca koran", masih sering ditemukan dalam banyak buku ajar atau bahkan contoh rumusan kalimat yang disampaikan guru di dalam kelas. Rumusan kalimat tersebut mencerminkan sifat feminim dan kerja domestik bagi perempuan serta sifat maskulin dan kerja publik bagi laki-laki.

Demikian pula dalam perlakuan guru terhadap siswa, yang berlangsung di dalam atau di luar kelas. Misalnya ketika seorang guru melihat murid laki-lakinya menangis, ia akan mengatakan "Masak laki-laki menangis. Laki-laki nggak boleh cengeng". Sebaliknya ketika melihat murid perempuannya naik ke atas meja misalnya, ia akan mengatakan "anak perempuan kok tidak tahu sopan santun". Hal ini memberikan pemahaman kepada siswa bahwa hanya perempuan yang boleh menangis dan hanya laki-laki yang boleh kasar dan kurang sopan santunnya.

Dalam upacara bendera di sekolah selalu bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa perempuan. Siswa perempuan itu dikawal oleh dua siswa laki-laki. Hal demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi bahkan di tingkat nasional. Paskibraka yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di istana negara, selalu menempatkan dua perempuan sebagai pembawa bendera pusaka dan duplikatnya. Belum pernah terjadi dalam sejarah: laki-laki yang membawa bendera pusaka itu. Singkatnya, ada aturan-aturan tertentu yang dituntut oleh masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Jika perempuan tidak dapat memenuhinya ia akan disebut tidak tahu adat dan kasar. Demikian pula jika laki-laki tidak dapat memenuhinya ia akan disebut banci, penakut atau bukan laki-laki sejati.

5. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural (Tilaar, 2009) berarti pengakuan akan adanya berjenis-jenis budaya yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multibudaya, oleh sebab itu pendidikan multikultural merupakan hal yang mutlak di dalam pendidikan nasional.

Pendidikan multikultural bukanlah merupakan suatu mata pelajaran yang khusus di dalam kurikulum sistem pendidikan nasional. Adalah lebih tepat apabila dikatakan bahwa

pendidikan multikultural merupakan bagian dari budaya pendidikan (*school cultur*). Apabila pendidikan multikultural merupakan bagian dari budaya sekolah maka berarti dia merupakan bagian dari budaya seluruh komponen kurikulum dalam sistem pendidikan nasional. Tentunya komponen pendidikan multikultural secara spesifik dapat diangkat dalam mata-mata pelajaran khusus seperti dalam mata pelajaran kewarganegaraan, mata pelajaran budi pekerti, mata pelajaran geografi, mata pelajaran civic, mata pelajaran sejarah nasional dan sebagainya.

Inti dari pendidikan multikultural ialah membangun semangat toleransi pada peserta didik. Semangat toleransi tersebut akan menjadi kohesi yang mengikat kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa yang lahir dari sikap toleransi tersebut merupakan modal sosial dan modal kultural dari suatu bangsa. Sebagai modal sosial, nilai-nilai Pancasila akan mempersatukan bangsa Indonesia yang Bhinneka itu di dalam menghadapi masalah-masalah nasional. Sebagai modal kultural, Pancasila dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan rasa persatuan, mengembangkan kebudayaan suku bangsa, dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam terbesar di dunia, maka pendidikan multikultural di Indonesia merupakan suatu contoh keberhasilan demokrasi.

Pendidikan multikultural mengakui adanya hak asasi manusia untuk mempunyai, memelihara dan hidup dengan kebudayaannya sendiri. Tanpa kebudayaan tidak mungkin terjadi proses pendidikan. Oleh sebab itu pemaksaan suatu kebudayaan tertentu di dalam proses pendidikan merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi manusia. Pedagogik kritis yang menopang pendidikan multikultural menuntut adanya pedagogic kesetaraan, yaitu kesetaraan antarpribadi, kesetaraan antarbudaya, dan mengakui akan kesamaan derajat manusia, kesetaraan martabat peserta didik. Dengan demikian, pedagogic kritis mengharamkan berbagai jenis diskriminasi rasial yang

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) sesungguhnya bukanlah pendidikan khas Indonesia. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan khas Barat. Kanada, Amerika, Jerman, dan Inggris adalah beberapa contoh negara yang mempraktikkan pendidikan multikultural. Ada beberapa nama dan istilah lain yang digunakan untuk menunjuk pendidikan multikultural. Beberapa istilah tersebut adalah: *intercultural education*, *interethnic education*, *transcultural education*, *multiethnic education*, dan *cross-cultural education* (L.H. Ekstrand dalam Lawrence J. Saha, 1997: 345-6).

Untuk konteks Indonesia, pendidikan multikultural baru sebatas wacana. Sejak tahun 2002 hingga sekarang ini wacana pendidikan multikultural berhembus di Indonesia. Beberapa tulisan di media, seminar, dan simposium cukup gencar mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Simposium internasional di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada tanggal 16-19 Juli 2002 adalah salah satu contoh simposium yang mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Seminar kali ini juga memiliki concern yang sama, bahwa wacana pendidikan multikultural perlu terus-menerus dihembuskan, bahkan perlu diujicobakan.

Untuk membahas topik ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pedagogik. Pendekatan ini digunakan untuk membahas bagaimana mengasuh, membesarkan, dan mendidik peserta didik melalui pendidikan multikultural. Dalam kaitan ini, ada dua hal penting yang perlu ditekankan, yaitu masalah didaktik dan metodik. Masalah didaktik perlu mendapat tekanan dalam tulisan ini dengan alasan bahwa didaktik merupakan bagian dari ilmu pendidikan yang membahas tentang cara membuat persiapan pembelajaran dan mengorganisir bahan pembelajaran.

6. Latar Belakang Pendidikan Multikultural

Sebagai sebuah ide, pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (civil right movement). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Alasan lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (nationality), suku (race or ethnicity), agama (religion), gender, dan kelas sosial (social class). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan (James A. Bank, 1989: 14). Dalam konteks Indonesia, peserta didik di berbagai lembaga pendidikan diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (lingua franca), 13.000 pulau, dan 5 agama resmi (Leo Suryadinata, dkk., 2003: 30, 71, 104, dan 179). Paling tidak keragaman latar belakang

siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan).

Lebih jauh, menurut Jose A. Cardinas (1975: 131), pentingnya pendidikan multikultural ini didasarkan pada lima pertimbangan: (1) incompatibility (ketidakmampuan hidup secara harmoni), (2) other languages acquisition (tuntutan bahasa lain), (3) cultural pluralism (keragaman kebudayaan), (4) development of positive self-image (pengembangan citra diri yang positif), dan (5) equality of educational opportunity (kesetaraan memperoleh kesempatan pendidikan).

Di pihak lain, Donna M. Gollnick (1983: 29) menyebutkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh beberapa asumsi: (1) bahwa setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda, dan bahkan dapat saling memberikan kontribusi; (2) keragaman budaya dan interaksinya merupakan inti dari masyarakat Amerika dewasa ini; (3) keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua orang merupakan hak bagi semua warga negara; (4) distribusi kekuasaan dapat dibagi secara sama kepada semua kelompok etnik; (5) sistem pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai demi kelangsungan masyarakat demokratis; serta (6) para guru dan para praktisi pendidikan dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural.

a. Kurikulum Pendidikan Multikultural

Dari aspek didaktik, kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan multikultural. Namun sebelum dibahas tentang masalah kurikulum pendidikan multikultural, bagian ini akan mengawali pembahasannya pada definisi dan tujuan pendidikan multikultural. Pembahasan tentang definisi dan tujuan ini penting untuk dilakukan, dengan alasan bahwa pemahaman terhadap definisi dan tujuan pendidikan multikultural ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kurikulum pendidikan multikultural.

Tentang definisi pendidikan multikultural ada baiknya dikutip pendapat Lawrence J. Saha. Menurutnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan multikultural dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan

kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap (Lawrence J. Saha, 1997: 348).

Lebih jauh tentang kurikulum pendidikan multikultural ini, Mark K. Smith (2002: 3) memosisikan kurikulum pada 4 (empat) pendekatan, yaitu: (a) kurikulum sebagai silabus (*curriculum as a body of knowledge to be transmitted*), (b) kurikulum sebagai produk (*curriculum as product*), (c) kurikulum sebagai proses (*curriculum as process*), dan (d) kurikulum sebagai praksis (*curriculum as praxis*). Dalam tulisan ini, fokus akan diarahkan pada dua pendekatan, yaitu: kurikulum sebagai silabus dan kurikulum sebagai proses.

Kurikulum sebagai silabus dapat dipahami dalam pengertian “sejumlah pernyataan atau daftar pokok-pokok bahasan, bahan ajar, dan sejumlah mata pelajaran yang akan dijadikan sebagai bahan dalam proses pembelajaran” (Smith, 2002: 3). Atas dasar ini, kurikulum dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan yang berbentuk mata pelajaran. Pendidikan yang menjadikan kurikulum sebagai silabus, dengan demikian, merupakan proses penyampaian sejumlah mata pelajaran kepada siswa dengan metode tertentu.

Untuk memberikan pendidikan multikultural, sekolah atau guru perlu menelaah secara kritis tentang materi dan bahan ajar yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, agar tidak terjadi berbagai macam bias. Dalam kaitan ini, Sadker sebagaimana dikutip Donna M. Gollnick & Philip C. Chinn (1983: 299-300) mencatat adanya 6 (enam) macam bias dalam buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Keenam macam bias tersebut adalah: (a) bias yang tidak kelihatan (*invisibility*), (b) pemberian label (*stereotyping*), (c) selektivitas dan ketidakseimbangan (*selectivity and imbalance*), (d) tidak mengacu realitas (*unreality*), (e) pembagian dan isolasi (*fragmentation and isolation*), dan (f) bahasa (*language*).

Untuk mengurangi kecenderungan bias tersebut, kurikulum berbasis multikultural perlu memasukkan materi dan bahan ajar yang berorientasi pada penghargaan kepada orang lain. Dalam hubungan ini, James Lynch (1986: 86-7) merekomendasikan agar sekolah atau guru menyampaikan pokok-pokok bahasan multikultural, dengan berorientasi pada 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) penghargaan kepada orang lain (*respect for others*), dan (b) penghargaan kepada diri sendiri (*respect for self*). Kedua bentuk penghargaan ini, mencakup 3 (tiga) ranah pembelajaran (*domain of learning*). Ketiga ranah pembelajaran tersebut adalah: pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), dan sikap (*affective*). Rekomendasi Lynch di atas mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara dimensi intelektual dan emosional dalam perilaku siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Jamaris, Martini.,(2010). *Orientasi baru dalam Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Panamas Murni.

Prawiradilaga, Dewi Salma, dkk., (2007). *Mozaik Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sajogyo, Pudjiwati, (1985). *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: FP IKIP Jakarta & BKKBN.

Soedijarto, (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas.

Tilaar, (2009) *Kredo Pendidikan (My Pedagogikal Credo)*, Jakarta: LM UNJ.

Tirtarahardja, Umar, dkk.,(2005). *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: PT. Rinneka Cipta.